

Menuju Hari Esok Lebih Baik

Peran Apa yang dapat Dilakukan Warga ?



BAHWA pembangunan bertujuan untuk menciptakan hari esok yang lebih baik, kiranya tak perlu lagi dipersoalkan. Begitu juga, bahwa keberhasilan pembangunan menuntut adanya peran serta masyarakat sudah sejak lama disadari. Makanya dalam setiap bab penutup GBHN pentingnya partisipasi masyarakat demi keberhasilan pembangunan selalu dinyatakan secara tegas.

Derap langkah pembangunan dengan segala kiprahnya memang telah berhasil memoles wajah kota Jakarta. Menjadi cantik, molek dan *kece*. Di sana-sini sudah banyak gedung mewah pencakar langit, jalan-jalan mulus, lampu-lampu gemerlapan di malam hari, pusat-pusat perbelanjaan, toko serba ada, rumah mewah sampai kepada alat transportasi dan fasilitas umum lainnya yang serba canggih namun, di balik semua itu, kota metropolitan ini masih dihadang sejumlah problema yang untuk mengatasinya sangat membutuhkan ketekunan dari para pelaksana pembangunan maupun partisipasi aktif warganya.

Disadari sepenuhnya bahwa membangun Jakarta menjadi kota BMW (Bersih, Manusiawi dan Wibawa) memang bukan urusan yang gampang. Walaupun Pemda DKI sudah berupaya dengan sungguh-sungguh, hasilnya dirasa masih belum optimal. Karena partisipasi warga Jakarta masih dirasa sangat kurang, seperti pernah diungkap Wakil Gubernur DKI Jakarta Bidang Pemerintahan, Basofi Sudirman. Akibatnya, di sana-sini masih terdapat sejumlah persoalan pelik yang saling kait-mengait.

Kalau ditelusuri lebih cermat, setidaknya terdapat 4 (empat) masalah pokok yang dihadapi kota Jakarta. **Pertama**, belum terkendalinya pertumbuhan penduduk dan penyebarannya sehingga menimbulkan berbagai persoalan yang rumit dan seolah tak terselesaikan. **Kedua**, masih belum terdapatnya keserasian antara usaha peningkatan kegiatan ekonomi dengan perluasan kesempatan kerja. **Ketiga**, masih rendahnya pemanfaatan sumberdaya manusia dan disiplin nasional, dan **Keempat**, belum mema-

dainya sarana dan prasarana kota dan kualitas lingkungan.

Persoalannya kemudian, adalah peran apa yang dapat dilakukan warga Jakarta dalam upaya menciptakan hari esok yang lebih baik, sejalan dengan cita-cita menjadikan Jakarta kota yang BMW, seperti yang dicanangkan Gubernur Wivogo Atmodarminto?

Program Pembangunan

Untuk mencari jawaban atas pertanyaan di atas setidaknya ada dua hal yang perlu ditelaah. Pertama, jenis program apa yang akan dilaksanakan oleh pemda DKI Jakarta. Kedua, bagaimana tahapan pelaksanaan program tersebut. Sehingga dapat disusun semacam matrik yang terdiri atas program pembangunan dan tahapannya. Dari situ lantas bisa dilihat peran apa yang dapat dilakukan warga Jakarta.

Atas dasar empat masalah pokok tadi, Pemda DKI Jakarta telah menetapkan sebelas prioritas program pembangunan. Pertama, pengendalian laju pertumbuhan penduduk dari 3,78 persen per tahun menjadi 3,52 persen dimana 1,62 persen merupakan pertumbuhan alamiah dan 1,9 persen migrasi. Kedua, pengembangan kegiatan ekonomi dan dunia usaha melalui pembinaan golongan ekonomi lemah, promosi, pengendalian penanaman modal, peningkatan fasilitas perdagangan, pengembangan koperasi dan pembinaan hubungan ketenagakerjaan.

Ketiga, peningkatan dan perluasan kesempatan kerja melalui program padat karya, diklat tenaga kerja mandiri, pengembangan bursa kesempatan kerja dan potensi tenaga kerja.

Keempat, pemeliharaan kehidupan dan kerukunan umat beragama melalui peningkatan wadah dan kelengkapan sarana dan prasarana ibadah, saling pengertian antar umat beragama; penyediaan sarana dan prasarana kehidupan beragama, peningkatan sistem pendidikan agama, bimbingan dan penyuluhan.

Kelima, pemasyarakatan ideologi Pancasila melalui penyelenggaraan penataran P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila), peningkatan kesadaran politik, pelaksanaan demokrasi Pancasila da kehidupan berkonstitusi.

Muchdie

Keenam, pengembangan sumberdaya manusia melalui penyediaan sarana dan prasarana pendidikan serta penyebarannya secara merata, pembangunan gedung sekolah baru, peningkatan daya tampung sekolah, penyediaan buku bacaan, perbaikan kurikulum, penyelenggaraan kegiatan olah raga dan pembinaan generasi muda.

Ketujuh, peningkatan kesehatan masyarakat dan lingkungan melalui peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat, pemberantasan penyakit menular, pembudayaan hidup bersih dan sehat, peningkatan gizi masyarakat, dan perlindungan masyarakat terhadap bahaya narkotika.

Kedelapan, peningkatan kelengkapan berbagai sarana dan prasarana kota melalui pembangunan jaringan jalan, perumahan kota, pembangunan rumah susun dan rumah sewa, penyediaan ruang terbuka hijau, dan penyediaan sarana dan prasarana perkotaan ke arah barat dan timur.

Kesembilan, peningkatan disiplin sosial dan partisipasi sosial melalui peningkatan kepatuhan dan tanggungjawab serta peran serta warga dalam pembangunan, pembinaan kesadaran hukum dan pembinaan generasi muda.

Kesepuluh, peningkatan kemampuan aparatur pemerintah yang dibarengi dengan penciptaan aparat yang bersih dan berwibawa melalui, diklat, peningkatan administrasi kepegawaian, penyempurnaan dan pemantapan organisasi mulai dari tingkat kelurahan sampai provinsi.

Kesebelas, peningkatan stabilitas politik, ekonomi dan sosial melalui perwujudan demokrasi Pancasila, peningkatan pemerataan pendapatan, perwujudan situasi yang aman, tertib dan mantap.

Tahapan Pembangunan

Pada dasarnya, kegiatan pembangunan itu terdiri atas 2 (dua) kegiatan pokok yang secara jelas harus terpisah, yaitu kegiatan akademis dan kegiatan birokratis. Kegiatan akademis merupakan suatu kegiatan yang berusaha untuk mengungkap fakta. Kegiatan ini boleh dilakukan oleh siapa saja. Oleh perguruan tinggi, mahasiswa, warga masyarakat biasa, organisasi kemasyarakatan atau pun siapa saja.

Kalau diurutkan, maka kegiatan akademis ini terdiri atas perumusan masalah, pengajuan hipotesis, pengumpulan data, analisis data melalui pemilihan data (*data selection*), korelasi data (membandingkan dua hal yang sama) dan analogi (membandingkan hal serupa di tempat ataupun pada waktu yang berbeda). Dari situ kemudian dapat diperoleh fakta, yang merupakan landasan penting bagi perumusan kebijakan pembangunan.

Kalau tujuan seseorang hanya ingin tahu, maka perolehan fakta merupakan akhir dari kegiatannya. Akan tetapi, oleh karena pembangunan merupakan suatu kegiatan berbuat sesuatu atas dasar fakta, maka kegiatan selanjutnya adalah penetapan kebijakan, penetapan prioritas, perumusan program dan proyek, penetapan lokasi proyek, pelaksanaan proyek, pemantauan dan evaluasi proyek serta pengawasan proyek. Kegiatan ini disebut kegiatan birokratis karena tidak dapat dilakukan oleh sembarang orang.

Misalnya, pada tingkat nasional penetapan kebijakan yang berupa penetapan GBHN yang meliputi tujuan pembangunan, hakikat, arah dan syarat-syarat pembangunan hanya boleh dilakukan oleh MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat). Penetapan prioritas yang berupa Krida Kabinet dan Sasaran Pembangunan hanya boleh dilakukan oleh Presiden.

Penterjemahan kebijakan pembangunan menjadi program dan proyek oleh Bappenas. Penetapan lokasi proyek hanya oleh instansi yang berwenang mengurus soal pertanahan, Badan Pertanahan Nasional misalnya. Pelaksanaan proyek oleh Departemen Teknis atau Kontraktor. Pemantauan dan evaluasi oleh DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) dan pengawasan oleh instansi yang kegiatannya berhubungan dengan tugas-tugas pengawasan seperti, Badan Pemeriksa Keuangan.

Peran Warga
Kalau dilihat dari tahapan kegiatan pembangunan seperti di atas, nampak dengan jelas bahwa peran pemerintah beserta seluruh aparatnya sangatlah dominan. Walau begitu, merupakan suatu aksioma bahwa pelaksanaan pembangunan bukan melulu tanggung-jawab pemerintah, tetapi juga tanggung-jawab seluruh warga. Sehingga, seluruh warga baik sendiri-sendiri maupun secara kelompok dituntut berpartisipasi dalam proses pembangunan. Agar hasil-hasil pembangunan dapat benar-benar dinikmati dan secara nyata meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Partisipasi warga kota Jakarta dalam membangun kotanya baik secara aktif maupun pasif, spontan atau pun terdorong oleh suatu situasi tertentu, langsung atau pun tidak langsung sebaiknya tidak dilakukan secara perorangan. Tetapi melalui suatu lembaga kemasyarakatan. Agar hasilnya bisa lebih dioptimalkan.

Seiring dengan terus berkembangnya aspirasi masyarakat, organisasi kemasyarakatan di Jakarta tumbuh dan berkembang dengan sangat pesat. Orientasinya pun sudah sangat beragam. Ada yang berorientasi politik, ada juga yang komersial. Ada yang berorientasi sosial dan keagamaan, ada juga yang berorientasi pada profesi. Bahkan ada kecenderungan munculnya organisasi kemasyarakatan yang berorientasi kedaerahan yaitu organisasi yang didirikan oleh warga masyarakat yang berasal dari daerah tertentu.

Untuk menciptakan hari depan yang lebih baik, organisasi kemasyarakatan tersebut haruslah dipandang sebagai suatu potensi karena peranannya yang begitu penting dalam memperlancar proses pembangunan. Organisasi kemasyarakatan yang berorientasi politik, misalnya, bisa berperan dalam banyak hal.

Seperti, pertama, turut secara aktif meningkatkan kesadaran anggotanya dalam bernegara dan bermasyarakat melalui berbagai program penyuluhan. Kedua, menjadi saluran yang efektif bagi aspirasi anggotanya. Ketiga, menyebarkan pengertian tentang berbagai kebijakan dan strategi pembangunan yang telah ditetapkan, atau pun berbagai rencana dan program pembangunan baik sektoral maupun regional. Keempat, mendukung pelaksanaan dari berbagai jenis kegiatan pembangunan, dan kelima melakukan pengawasan sosial atas jalannya kegiatan pembangunan.

Walaupun tujuan utamanya mencari keuntungan, organisasi kemasyarakatan yang berorientasi komersial sebenarnya mempunyai peran yang sangat penting dalam proses pembangunan karena ia sesungguhnya tetap mempunyai tanggung jawab sosial yang harus dipenuhi. Meskipun wajar saja kalau organisasi ini mengejar keuntungan, tapi mestinya keuntungan tersebut tidak diperoleh dengan cara mengorbankan kepentingan masyarakat banyak.

Menjalankan roda organisasi pun seyogianya tidak hanya berorientasi pada kepentingan pemilik modal dan pimpinan perusahaan saja, tetapi juga demi kepentingan para

karyawannya. Berbagai kegiatan yang dilakukan mestinya mendukung kebijakan pemerintah seperti perluasan kesempatan kerja.

Berbagai peran spesifik yang dapat dilakukan oleh organisasi seperti ini misalnya turut berperan aktif dalam mensukseskan berbagai program dan proyek yang sudah diprioritaskan, menunjukkan rasa solidaritas sosial yang tinggi melalui pembudayaan cara hidup yang sesuai dengan kondisi masyarakat pada umumnya, turut terlibat dalam peningkatan mutu hidup orang banyak dan mestinya tidak membatasi diri pada kegiatan-kegiatan yang bersifat ekonomi semata-mata.

Walaupun seringkali sulit mengidentifikasi organisasi yang berorientasi sosial, tapi buat gampangnya dapat diartikan sebagai organisasi bukan pemerintah yang tidak mencari keuntungan. Di sini motivasi para pemimpinnya lebih pada pengabdian dan amal. Sehingga peranannya dapat berbentuk penyaluran keinginan dan harapan tertentu bagi sekelompok anggota masyarakat yang kurang beruntung.

Di sisi lain, para pemimpin organisasi ini dapat berperan dalam meningkatkan daya guna dan hasil guna dari kegiatan-kegiatan pembangunan yang menyangkut kesejahteraan kelompok yang kurang beruntung itu tadi.

Peran organisasi yang bero-

rientasi keagamaan juga sangat penting mengingat kesejahteraan yang ingin diperoleh dari pembangunan bukanlah kesejahteraan fisik semata. Organisasi ini diharapkan dapat berperan dalam meningkatkan ketaatan umat yang pada gilirannya akan meningkatkan kerukunan hidup di masyarakat, meningkatkan kesadaran tentang betapa pentingnya umat beragama memenuhi kewajibannya kepada negara bangsa dan pemerintah, atau pun meningkatkan toleransi keagamaan terhadap anggota masyarakat yang menganut agama lain.

Organisasi profesi, yang anggotanya bukan hanya mereka yang berpendidikan relatif tinggi dan mempunyai kemampuan berpikir yang rasional, tetapi juga mempunyai daya serap dan daya sebar yang tinggi terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi, diharapkan dapat memainkan peranan yang penting. Misalnya sebagai sumber ide bahan masukan yang perlu dipertimbangkan dan dituangkan dalam berbagai kebijakan dan strategi pembangunan. Juga, sebagai pembuat telaahan dan kajian atas kebijakan, strategi, rencana dan program baik yang sudah maupun yang akan ditetapkan. Atau pun sebagai motivator bagi anggota masyarakat dalam upaya meningkatkan peran sertanya dalam proses pembangunan.

Kalau begitu, jelas peran organisasi kemasyarakatan menjadi sangat penting dalam upaya mewujudkan hari esok yang lebih baik bagi warga Jakarta. Agar partisipasi warganya dapat lebih ditingkatkan secara optimal. Sehingga dapat bersama-sama pemerintah mengatasi berbagai problema ibukota yang kian hari kian menumpuk ***

Penulis, Asisten Peneliti Madya Bidang Analisa Sistem.